

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian	18
1.7. Lokasi Penelitian	20
1.8. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Perlindungan Hukum	24
2.2. Teori Penegakan Hukum	25
2.3. Teori Efektivitas Hukum	29
2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana	31
2.4.1. Pengertian Pidana	31
2.4.2. Pengertian Tindak Pidana	37
2.4.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	43

2.4.4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana	47
2.4.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	48
2.4.6. Pembuktian Tindak Pidana	49
2.5. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	51
2.6. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	59
2.7. Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor	61
2.7.1. Pengertian Kendaraan Bermotor	61
2.7.2. Pengertian Penimbangan Kendaraan Bermotor	62
2.7.3. Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	72
3.1.1. Gambaran Umum Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Gentong Kabupaten Tasikmalaya	72
3.1.2. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa Surat Keterangan Uji Berkala Berdasarkan Pasal 288 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tasikmalaya.....	79
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa Surat	

<p>Keterangan Uji Berkala Berdasarkan Pasal 288 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tasikmalaya</p>	83
<p>3.1.4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa Surat Keterangan Uji Berkala Berdasarkan Pasal 288 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tasikmalaya</p>	85
<p>3.2. Pembahasan</p>	93
<p>3.2.1. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa Surat Keterangan Uji Berkala Berdasarkan Pasal 288 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tasikmalaya.....</p>	93
<p>3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa Surat Keterangan Uji Berkala Berdasarkan Pasal 288</p>	

Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tasikmalaya 98

3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa Surat Keterangan Uji Berkala Berdasarkan Pasal 288 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tasikmalaya 101

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 105

4.2. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN